

Daftar Pustaka

- Afifah, Nurul Azmi. 2018. “Analisis Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tolitoli”. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi Kelima. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- BPK RI, 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016. Jakarta : BPK RI.
- BPK RI, 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017. Jakarta : BPK RI.
- Cresswell, John Well. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approaches. Fourth Edition. Thousand Oaks. California.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. *Kebijakan Pengelolaan Dana Desa: Pengalokasian, Penyaluran, Monitoring dan Pengawasan*. diakses 4 Maret 2019 <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Sosialisasi-Pengawas-Desa-Dit.-PTNDP.pdf>
- Donaldson, Lex and James H. Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management. 16(1): 49-64.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendartono, Agus. 2018. “Analisis Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Purwarejo”. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Hennink, Monique, Inge Hutter, Ajay Bailey. 2011. Qualitative Research Methods. London: SAGE Publications
- Jati, Wasito Raharjo. 2012. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. Jurnal Konstitusi. 9(4): 743-773.
- Khoiriza, Muhammad. 2016. Desentralisasi Sebagai Upaya Pembangunan Desa Secara Menyeluruh Menurut UU No.16 Tahun 2014. Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum. 50(1): 241-258.

- Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung
- Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Se-Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2016. *Research Methods for Business*. Edisi Ketujuh. United Kingdom: John Wiley & Sons.\
- Sumarna, Ayi. 2015. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. (<https://www.keuangandes.info/2015/11/pelaporan-dan-pertanggungjawaban.html> di akses 5 April 2019)
- Umbing, Golda. 2017. "Evaluasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa." Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Yin, Robert K. 2014. *Case Study Research Design dan Method*. Fifth Edition.
Washington: COSMOS Corporation.